

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berperan penting dalam meningkatkan daya saing bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran, tenaga pendidik, dan kurikulum, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya, khususnya sumber daya keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat penting untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, tata kelola keuangan pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi administrasi publik di sektor pendidikan (Mulyasa, 2022).

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan instrumen pembiayaan pemerintah yang bertujuan membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasional nonpersonalia sehingga dapat meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah, seperti pelaksanaan proses pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana, penyediaan bahan ajar, pengembangan kompetensi guru, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Program BOS sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam mengelola dana tersebut secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan prioritas satuan pendidikan (Kemendikdasmen, 2025).

Secara nasional, pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagian dari anggaran tersebut disalurkan melalui Program BOS kepada jutaan peserta didik di seluruh Indonesia. Besarnya dana yang dikelola oleh satuan pendidikan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan sekolah memiliki posisi yang sangat strategis. Pengelolaan dana yang tidak efektif berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program sekolah, rendahnya kualitas

pelayanan pendidikan, bahkan berisiko menimbulkan penyimpangan administrasi maupun keuangan (Kemendikdasmen, 2025).

Seiring meningkatnya tuntutan terhadap penerapan prinsip good governance, pengelolaan dana BOS tidak lagi hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari efektivitas pencapaian tujuan program, efisiensi penggunaan sumber daya, transparansi informasi, dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan. Sekolah dituntut mampu menyusun perencanaan anggaran yang realistis, melaksanakan penggunaan anggaran sesuai ketentuan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas layanan pendidikan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah (Mardiasmo, 2021).

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah, pemerintah mengembangkan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/RKAS) sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dana BOS dan sumber pendanaan lainnya. Penerapan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah, mempermudah pengelolaan administrasi keuangan, mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan (Kemendikdasmen, 2025).

Implementasi Aplikasi RKAS merupakan bagian dari transformasi digital dalam tata kelola keuangan pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan sekolah diyakini mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses pelaporan, serta memudahkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS. Dengan sistem yang terintegrasi, seluruh proses pengelolaan anggaran sekolah dapat terdokumentasi secara lebih sistematis sehingga mampu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien (Arismun *et al.*, 2022).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi RKAS masih menghadapi sejumlah kendala. Arismun *et al.* (2022) menemukan bahwa

keberhasilan implementasi aplikasi dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, dukungan organisasi, serta kualitas pendampingan dari dinas pendidikan. Hidayah (2023) mengungkapkan bahwa masih terdapat sekolah yang mengalami kesulitan dalam penyusunan RKAS akibat keterbatasan kemampuan operator, rendahnya literasi digital, dan perubahan regulasi yang dinamis. Diantari *et al.* (2024) juga menjelaskan bahwa pemanfaatan aplikasi digital pengelolaan keuangan sekolah mampu meningkatkan akuntabilitas, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan kualitas implementasi sistem.

Fenomena tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), BPK masih menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana BOS, antara lain ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan petunjuk teknis, kelemahan administrasi pertanggungjawaban, serta belum optimalnya pengendalian internal pada pengelolaan dana pendidikan (BPK RI, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pengelolaan keuangan belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai kendala apabila tidak didukung oleh kompetensi pengelola keuangan sekolah dan pengelolaan anggaran yang efisien.

Kondisi tersebut juga terjadi pada satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK (SMA/K), termasuk di wilayah Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. SMA/K memiliki karakteristik kebutuhan operasional yang beragam sesuai dengan program pembelajaran yang diselenggarakan. Khususnya pada SMK, kebutuhan pembiayaan praktik, pengadaan bahan habis pakai, pemeliharaan peralatan praktik, dan pelaksanaan praktik kerja lapangan memerlukan perencanaan anggaran yang lebih rinci. Sementara itu, SMA juga membutuhkan pengelolaan anggaran yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran, pengembangan kompetensi peserta didik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, penerapan Aplikasi RKAS menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan dana BOS pada SMA/K. Adapun penerimaan dan realisasi dana BOS pada tahun 2025 dapat dilihat pada table 1

Tabel 1.1 Penerimaan dan Realisasi Dana BOS pada Tahun 2025

Sekolah	Penerimaan	Realisasi	Saldo Akhir	Persentase
SMAN 1 KENCONG	936,800,000	859,334,300	77,465,700	92%
SMAS PGRI KENCONG	66,400,000	57,425,000	8,975,000	86%
SMKS PGRI 5 JEMBER	1,267,110,000	889,745,000	377,365,000	70%
SMKS MAARIF NU KENCONG	261,630,000	198,073,000	63,557,000	76%
SMKS ISLAM ASH SHUUFİYAH KENCONG	79,515,000	67,689,000	11,826,000	85%
SMKS MUHAMMADIYAH 5	436,050,000	353,241,000	82,809,000	81%
SMK ASSUNNIYYAH AL JAUHARI	88,065,000	74,390,000	13,675,000	84%

Sumber : Data BOS Cabdin Jember (2026)

Berdasarkan data penerimaan dan realisasi Dana BOS SMA/K di Kecamatan Kencong Tahun 2025, masih terlihat adanya perbedaan tingkat penyerapan anggaran antarsekolah. Persentase realisasi Dana BOS berkisar antara 70% hingga 92%. SMAN 1 Kencong mencatat tingkat realisasi tertinggi sebesar 92%, sedangkan SMKS PGRI 5 Jember hanya mampu merealisasikan 70% dari total dana yang diterima sehingga masih menyisakan saldo akhir sebesar Rp377.365.000. Kondisi serupa juga terlihat pada SMKS Ma'arif NU Kencong dengan tingkat realisasi sebesar 76% dan saldo akhir Rp63.557.000, serta SMKS Muhammadiyah 5 yang merealisasikan 81% dana BOS dengan saldo akhir Rp82.809.000. Sementara itu, beberapa sekolah lain seperti SMAS PGRI Kencong, SMKS Islam Ash Shuufiyah Kencong, dan SMK Assunniyyah Al Jauhari menunjukkan tingkat realisasi masing-masing sebesar 86%, 85%, dan 84%.

Variasi tingkat penyerapan Dana BOS tersebut menunjukkan bahwa kemampuan setiap sekolah dalam mengelola anggaran belum merata. Masih terdapat sekolah yang memiliki saldo akhir relatif besar akibat rendahnya tingkat realisasi anggaran, sedangkan sekolah lain mampu memanfaatkan dana BOS dengan tingkat penyerapan yang lebih optimal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran sekolah belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Apabila dana BOS tidak dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah, maka tujuan program BOS dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan berpotensi belum tercapai secara maksimal.

Hasil observasi awal di beberapa SMA/K di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember juga menunjukkan masih ditemukannya berbagai kendala dalam implementasi Aplikasi RKAS. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain keterlambatan penyusunan RKAS, revisi anggaran yang berulang akibat perubahan kebutuhan sekolah, keterbatasan kompetensi operator dalam mengoperasikan aplikasi, serta belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan Dana BOS. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan Aplikasi RKAS belum sepenuhnya mampu mendukung efektivitas pengelolaan Dana BOS di setiap sekolah.

Dalam perspektif manajemen keuangan publik, efektivitas pengelolaan Dana BOS tidak hanya ditentukan oleh penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam mengelola anggaran secara efisien. Efisiensi pengelolaan anggaran sekolah mencerminkan kemampuan satuan pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal sehingga setiap dana yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal bagi penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, efisiensi pengelolaan anggaran sekolah diduga menjadi mekanisme yang menjelaskan hubungan antara penerapan Aplikasi RKAS dengan peningkatan efektivitas pengelolaan Dana BOS.

Hingga saat ini, sebagian besar penelitian mengenai Aplikasi RKAS masih berfokus pada aspek implementasi sistem, kepatuhan administrasi, transparansi, maupun akuntabilitas pelaporan keuangan sekolah. Penelitian yang mengkaji pengaruh Aplikasi RKAS terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS dengan memasukkan efisiensi pengelolaan anggaran sekolah sebagai variabel mediasi, khususnya pada SMA/K di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, masih relatif terbatas. Padahal, pengujian variabel mediasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme bagaimana digitalisasi pengelolaan keuangan sekolah melalui Aplikasi RKAS dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS.

Berdasarkan fenomena adanya perbedaan tingkat realisasi Dana BOS antar sekolah, masih besarnya saldo akhir pada beberapa satuan pendidikan, serta berbagai kendala dalam implementasi Aplikasi RKAS, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Aplikasi RKAS terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS dengan efisiensi

pengelolaan anggaran sekolah sebagai variabel mediasi pada SMA/K di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh aplikasi rkas terhadap efektivitas pengelolaan dana bos ?
2. Bagaimana pengaruh aplikasi rkas terhadap efisiensi pengelolaan anggaran sekolah
3. Bagaimana pengaruh efisiensi pengelolaan anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS ?
4. Bagaimana pengaruh aplikasi rkas terhadap efektivitas pengelolaan dana bos yang di mediasi oleh efesiensi pengelolaan anggaran sekolah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh aplikasi rkas terhadap efektivitas pengelolaan dana bos
2. Mengetahui pengaruh aplikasi rkas terhadap efisiensi pengelolaan anggaran sekolah
3. Mengetahui pengaruh efisiensi pengelolaan anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS ?
4. Mengetahui pengaruh aplikasi rkas terhadap efektivitas pengelolaan dana bos yang di mediasi oleh efesiensi pengelolaan anggaran sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis: Untuk mengembangkan keterampilan penelitian, analisis data, dan penulisan ilmiah, yang sangat penting bagi karier di bidang akuntansi.
2. Bagi Sekolah: Untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS, sehingga penggunaan dana menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Bagi Universitas: Penelitian yang berkualitas dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai institusi yang menghasilkan penelitian relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.